

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan dunia tidak terlepas dari persoalan kemiskinan yang tersebar luas dan telah ada sejak dahulu kala hingga saat ini yang terus dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Kemiskinan, kesenjangan sosial dan spasial, pengangguran usia produktif, kelangkaan pangan dan menipisnya cadangan energi merupakan tantangan besar bagi bangsa Indonesia memasuki pasar bebas dan persaingan global (Mopangga 2014). Masalah kemiskinan seringkali dihadapi oleh negara berkembang dan memiliki jumlah penduduk yang banyak mengakibatkan terjadi ketidakseimbangan antara penduduk dengan pendapatan dan menyebabkan ketimpangan ekonomi. Kemiskinan itu sendiri dapat digambarkan sebagai keadaan dimana ketidakmampuan ekonomi untuk mencapai standar hidup rata-rata. Berdasarkan beberapa aspek kemiskinan yang komprehensif, kemiskinan berdampak pada beberapa aspek antara lain seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Kemiskinan seringkali diartikan sebagai kondisi dimana suatu keluarga tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar sehingga dapat dikatakan kurang berkecukupan dalam pemenuhan standar hidup layak. Upaya pengentasan kemiskinan yang gencar dilakukan dengan menekan angka kemiskinan tidak hanya digerakkan oleh pemerintah saja tetapi juga oleh semua lapisan masyarakat.

Diantara banyak kondisi yang menggambarkan kemiskinan, pemerintah telah mengeluarkan banyak dana untuk pengentasan kemiskinan. Setiap tahun

pemerintah mengeluarkan banyak uang dalam membantu individu/kelompok menghilangkan kelaparan dan kemiskinan ke arah lebih baik. Namun, angka kemiskinan cenderung meningkat menunjukkan bahwa belanja publik yang ditempuh sebagai program pengentasan kemiskinan ternyata belum mampu mengatasi kemiskinan. Dengan begitu banyak dana yang dialokasikan pemerintah serta dibentuknya kebijakan pembangunan rumah bagi kelompok miskin namun kelompok masyarakat miskin masih banyak yang belum dapat menikmati karena masalah keterbatasan dalam mengakses informasi. Satu bentuk tindakan bersama tersebut adalah upaya peningkatan taraf hidup masyarakat termasuk upaya untuk mengurangi kemiskinan (Usman 2015). Dalam hal ini tindakan bersama tadi dapat berupa berbagai usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan. Kemunculan berbagai kelompok usaha produktif dalam masyarakat baik yang dirintis oleh masyarakat sendiri maupun yang diinisiasi dari luar merupakan contohnya. Tidak jarang berbagai tindakan bersama yang bersifat produktif tadi diputuskan dan dirancang bersama berdasarkan masalah dan kebutuhan yang diidentifikasi bersama melalui institusi lokal. Menurut Ife (2002) dalam Resnawaty (2016) mengemukakan bahwa ciri keberdayaan adalah sebagai berikut: (1) Keberdayaan dalam menentukan pilihan dan kesempatan dalam hidup (*power over personal choices and life chances*) banyak orang yang kurang berdaya untuk menentukan nasib hidupnya, seperti dalam menentukan matapencaharian. Pada kasus kemiskinan, orang memiliki pilihan yang amat sedikit dalam mengambil keputusan mengenai hidup mereka. (2) *Power over the assertion of human rights*, merupakan keberdayaan dalam menuntut penyelenggaraan hak asasi manusia terhadap diri dan

lingkungannya. Jika dikaitkan dengan program PKH itu sendiri, pemenuhan kebutuhan hidup merupakan hak asasi bagi seluruh manusia. Hambatan dalam pemenuhan kebutuhan merupakan tidak terpenuhinya hak asasi itu sendiri. (3) Keberdayaan dalam mendefinisikan kebutuhan (*power over the definition of need*). Seringkali kebutuhan masyarakat miskin tidak ditentukan oleh pemerintah melalui perencanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. (4) Keberdayaan dalam mengemukakan gagasan (*power over ideas*). Dengan kata lain merupakan kapasitas seseorang dalam menyampaikan gagasan di dalam forum publik, kapasitas seseorang untuk terlibat dalam dialog dengan orang lain dan kemampuan orang untuk memiliki gagasan yang dapat berkontribusi dalam perbaikan kehidupan bersama. (5) Keberdayaan terhadap institusi (*power over institutions*). Seringkali Ketidakberdayaan masyarakat atau seseorang disebabkan oleh institusi sosial seperti sistem pendidikan, struktur pemerintahan. keberdayaan ini berarti individu maupun komunitas mampu bertindak atas dampak yang diakibatkan oleh institusi tersebut. Nampaknya hal ini yang menjadi fokus dari program PKH. (6) Keberdayaan terhadap sumber-sumber kehidupan (*power over resources*). Banyak sekali komunitas yang tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber kehidupan yang ada. hal ini dapat terjadi baik pada sumber yang bersifat finansial maupun *non monetary resources* seperti pendidikan. Keberdayaan ini dapat dicapai ketika terdapat keadilan dalam distribusi dan penggunaan sumber-sumber. (7) Keberdayaan dalam melakukan aktivitas ekonomi (*power over economic activity*). Merupakan kapasitas masyarakat untuk mengontrol mekanisme produksi, distribusi dan pertukaran yang terjadi. Hal ini

berkaitan dengan kesempatan untuk melakukan usaha. (8) Keberdayaan atas reproduksi (*power over reproduction*). Merupakan keberdayaan yang tidak hanya berkaitan dengan kelahiran, namun juga latar belakang seseorang, bagaimana proses sosialisasi dan edukasi dilakukan.

Salah satu pemicu yang mendominasi angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Bone Bolango yakni rendahnya sumber daya manusia, sehingga mengakibatkan daya saing dalam memperoleh peluang kerja jadi rendah. SDM yang terbilang rendah diakibatkan oleh tingkat Pendidikan yang rendah pula yang dimana masyarakat lebih memilih bekerja di usia muda dibanding melanjutkan pendidikannya. Dengan demikian adanya Program Keluarga Harapan diharapkan dapat memalingkan stigma masyarakat terkhusus para orang tua perihal betapa serius dan berartinya Pendidikan, karena orang tua berperan dalam memfokuskan anak-anak agar terus menikmati Pendidikan. Strategi penanggulangan kemiskinan Indonesia tertera dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Selain itu, bagian pertama dari SDGs adalah zero kemiskinan, sehingga pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Program Keluarga Harapan berupaya dalam memenuhi *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Program Keluarga Harapan merupakan usaha penanggulangan kemiskinan yang dibuat melalui Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Program Keluarga Harapan diharapkan dapat memberi kualitas hidup yang lebih meningkat

pada masyarakat di Kabupaten Bone Bolango, melalui Kesehatan dan Pendidikan yang kemudian diharapkan dapat menanggulangi kemiskinan yang menjadi polemik. Dengan begitu, PKH diharapkan dapat membangun perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin dalam mempertahankan kesejahteraan hidup dan kesejahteraan sosial. Dengan dibentuknya Peraturan Presiden tentang Penanggulangan Kemiskinan, terlihat bahwa pemerintah sangat serius dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Begitu banyak program oleh pemerintah, ketika satu program dihentikan muncul program lain. Namun, masalah kemiskinan tidak pernah terselesaikan miskin merupakan permasalahan yang penyebabnya banyak. Pemerintah memiliki banyak program bantuan sosial untuk membantu masyarakat, salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut (Nasikun 2002), keberhasilan program-program anti kemiskinan harus didukung oleh sebuah gerakan sosial yang tidak hanya mensyaratkan penyelenggaraan program-program yang kuat dan dana yang melimpah, tetapi juga dukungan banyak hal yang lain: mulai dari landasan ideologi yang “membebaskan” (*liberating*) dan “mencerahkan” (*enlighting*), kepemimpinan karismatis yang kuat, dan jaringan organisasi rapih, sampai dengan pemilihan dan penggunaan lambang-lambang gerakan yang memikat.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan efektivitas perlindungan sosial terutama penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007, pemerintah Indonesia mencanangkan Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (9) UU Nomor 11 November Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa perlindungan sosial adalah serangkaian upaya pencegahan dan

penanggulangan risiko guncangan dan kerugian sosial (Pedoman Umum Program Keluarga Harapan).

PKH adalah program perlindungan sosial yang diberikan pemerintah berupa bantuan sosial bersyarat yang akan diberikan kepada keluarga kurang mampu yang tercatat dalam kumpulan data Penanggulangan Kemiskinan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang diolah oleh Pusat Data dan Informasi Perlindungan Sosial. kemudian ditetapkan untuk memenuhi syarat sebagai keluarga penerima PKH. PKH dirancang dengan maksud meningkatkan mutu hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial. Perlu adanya program perlindungan sosial yang terencana, tepat sasaran dan berkelanjutan. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bantuan sosial berupa uang, barang dan jasa bagi keluarga miskin, tidak mampu dan rentan. Peserta penerima bantuan PKH disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM). KPM yang terdaftar tentunya sudah memenuhi syarat dan ketentuan undang-undang. PKH adalah bantuan sosial bersyarat yang ditujukan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan bagi keluarga miskin dan/atau rentan. Penyaluran PKH merupakan bagian dari upaya pengentasan kemiskinan dan ketimpangan dengan membantu meningkatkan akses pelayanan kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial untuk mendorong kapabilitas hidup keluarga miskin dan rentan.

Program PKH dilaksanakan dengan tujuan memberikan perlindungan sosial kepada keluarga miskin dan/atau rentan dan pada akhirnya mendukung upaya penanggulangan kemiskinan nasional. Program PKH bertujuan mengoptimalkan

taraf kehidupan KPM meliputi layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial; dalam jangka pendek, PKH perlu menghasilkan pendapatan bagi keluarga miskin dan/atau rentan; dalam jangka menengah, PKH perlu mampu mewujudkan perubahan perilaku peserta dalam memanfaatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial guna mewujudkan generasi yang lebih sehat dan cerdas; sedangkan dalam jangka panjang, PKH perlu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, memutus mata rantai kemiskinan antar generasi; serta memperkenalkan manfaat produk dan layanan keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat. Dalam program Keluarga Harapan yang tujuannya digunakan dalam bidang pendidikan dan kesehatan, anak-anak peserta program Keluarga Harapan harus berkomitmen untuk terus mengunjungi fasilitas secara rutin, fasilitas kesehatan seperti posyandu, Polindes dan pushkesmas, sedangkan Pada komponen pendidikan, setiap anak peserta PKH usia sekolah wajib bersekolah dengan tingkat kehadiran minimal 80%. Komitmen ini harus dipertahankan agar harapan program pemutusan mata rantai kemiskinan ini, khususnya melalui sektor pendidikan dan kesehatan, dapat terwujud.

Menurut Biadihi (2018) ada lima hal yang menjadi prioritas Kabupaten Bone Bolango hingga tahun 2021. Pertama program rakyat miskin dan pembangunan desa, yang kedua adalah akses dan prioritas layanan pendidikan, ketiga peningkatan dan kecakupan layanan kesehatan, keempat percepatan pertumbuhan ekonomi dan kelima pembangunan infrastruktur dasar dan pengembangan kawasan.

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam hal kesejahteraan masyarakat, pemerintah telah mengupayakan Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan diharapkan dapat menjadi salah satu langkah dalam menstimulasi paradigma perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam meningkatkan kesejahteraan hidup dan juga sebagai upaya memotong rantai kemiskinan yang sudah terbentuk. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi bahwa masih banyak masyarakat Kabupaten Bone Bolango yang belum dapat digolongkan sejahtera. Masih banyak masyarakat yang mengandalkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai sumber utama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga hal tersebut membuat masyarakat belum sadar akan usaha peningkatan taraf hidupnya. Studi ini membahas masalah yang akan diulas agar penjelasan mengenai permasalahan dan pemecahan masalah dapat terarah. Penulis akan meneliti tentang Analisis Pemberian Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Bone Bolango.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Apakah pemberian Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bone Bolango?
2. Bagaimana pengaruh pemberian Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bone Bolango?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bone Bolango.
2. Untuk menganalisis Pengaruh Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bone Bolango.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Kajian ini akan memberikan kontribusi ilmiah pada studi tentang pengaruh ketimpangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan.
2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembandingan pada penelitian-penelitian serupa di masa yang akan datang.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, studi ini dapat menambah wawasan pengetahuan baru tentang dampak bansos terhadap kemiskinan di Kabupaten Bone Bolango.
2. Bagi masyarakat, besar harapan studi ini dapat mengatasi kemiskinan dengan mengkoordinir berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.
3. Bagi pemerintah, besar harapan agar bantuan sosial yang disalurkan dapat menekan jumlah penduduk miskin.